

## ABSTRAK

### **Kaela Meta Ramadhani (1188010104) : “Upaya Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi”**

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan pemerintah daerah sehingga memberikan keleluasaan pemerintah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga dengan lebih baik. Pengamanan aset tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah harus berjalan secara optimal. Namun fenomena yang terjadi di Kabupaten Bekasi, pengelolaan aset/ barang milik daerah atas tanah belum dikelola dengan baik, masi banyak aset tanah milik pemerintah kabupaten Bekasi yang belum bersertifikat dan di klaim oleh pihak lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi yang terdiri dari tiga cara yaitu upaya pengamanan administrasi, upaya pengamanan fisik, dan upaya pengamanan hukum.

Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori (Suwanda, 2013) yang didalamnya terdapat tiga dimensi untuk melaksanakan upaya pengamanan aset/ barang milik daerah yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mempelajari serta memahami makna. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti melakukan penghimpunan informasi secara lengkap terkait sebuah kasus. Adapun teknik penumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kegiatan dan upaya pengamanan aset tanah milik pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi belum optimal. Dalam pengamanan administrasi dilakukan dengan melakukan inventarisasi dengan aplikasi SIMDA BMD khusus aset tanah pada KIB A, serta penyimpanan dilakukan pada brankas BPKD Kabupaten Bekasi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat data aset tanah yang belum lengkap yaitu luasan tanah. Pengamanan fisik dilakukan dengan memasang plang, tanda patok, dan pemagaran, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kerusakan dan kehilangan pada plang yang telah di pasang, dikarenakan belum adanya pengawasan rutin. Pengamanan hukum, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen guna melakukan proses sertifikasi, dan terdapat tanah yang di klaim oleh pihak lain serta belum sepenuhnya aset tanah disertifikatkan.

**Kata Kunci** : Pengamanan Aset, Tanah Milik Pemerintah, BPKD

## **ABSTRACT**

**Kaela Meta Ramadhani (1188010104) : “Upaya Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi”**

*Regional autonomy has given local government authority so as to give the government more flexibility in regulating and managing households better. Securing land assets at the Regional Financial Management Agency must run optimally. However, the phenomenon that occurs in Bekasi Regency is that the management of regional assets/goods on land has not been managed properly, there are still many land assets belonging to the Bekasi Regency government that have not been certified and are claimed by other parties.*

*This study aims to find out how the Government's Land Assets Security Efforts at the Regional Financial Management Agency (BPKD) Bekasi Regency consist of three ways, namely administrative security efforts, physical security efforts, and legal security efforts.*

*The theory that the researcher uses in this study is the theory (Suwanda, 2013) in which there are three dimensions to carry out efforts to secure regional assets/goods, namely administrative security, physical security, and legal security.*

*This study uses qualitative research methods with the aim of studying and understanding the meaning. Researchers use a case study approach, researchers collect complete information related to a case. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation.*

*Activities and efforts to secure government-owned land assets at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Bekasi Regency have not been optimal. Administrative security is carried out by conducting an inventory using the SIMDA BMD application specifically for land assets at KIB A, and storage is carried out in the Bekasi Regency BPKD safe, but in practice there are still incomplete land asset data, namely land area. Physical security is carried out by installing signs, stake signs, and fencing, but in practice there is still damage and loss of the installed signs, due to the absence of routine supervision. Legal safeguards are carried out by collecting documents to carry out the certification process, and there are lands that are claimed by other parties and have not been fully certified.*

**Keywords:** Asset Protection, Government Owned Land, BPKD